



id.EITI News

Transparansi Untuk Industri Ekstraktif Indonesia

Daftar Isi

- Laporan Pertama EITI Indonesia Berikan Perspektif Industri..... 1
- Validasi: Saatnya Penentuan Status EITI Indonesia..... 2
- Edukasi Pemahaman EITI Indonesia oleh Organisasi Masyarakat Sipil...3
- Catatan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia Tahap II 4
- Transparansi Sektor Minerba 6
- OMS Indonesia Bantu Filipina dalam Implementasi EITI 7
- Kalender Pencapaian EITI Indonesia - Semester I 2013.....8

Kalender Kegiatan EITI Indonesia - Juni 2013

3 Juni 2013: Diskusi EITI dengan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau yang diorganisir oleh LPAD Riau

4 Juni 2013: Media Briefing untuk jurnalis institusi pers Indonesia

18 Juni 2013: Sosialisasi Kedua untuk Laporan Pertama EITI Indonesia bertempat di Hotel Novotel, Surabaya dengan agenda:

1. Sosialisasi Laporan Pertama EITI Indonesia Tahun 2009
2. Persiapan Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2010-2011

Informasi lebih lanjut, kunjungi <http://eiti.ekon.go.id/> atau hubungi tim sekretariat via email sekretariat@eiti.ekon.go.id



Delegasi Tim EITI Indonesia pada Konferensi Global ke-6 EITI, Sydney, Australia, yang berlangsung pada 23-24 Mei 2013.

Laporan Pertama EITI Indonesia Berikan Perspektif Industri

Laporan Pertama Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) Indonesia adalah laporan perbandingan atau rekonsiliasi angka pencatatan penerimaan Pemerintah dengan angka yang disetorkan oleh perusahaan minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun kalender 2009, setelah adanya potongan tertentu, Pemerintah mencatat penerimaan sebesar Rp251.7 trilyun (US\$24.2 milyar pada kurs Rp10,400).

Meskipun kontribusi total sektor migas terhadap penerimaan Negara telah lama menjadi informasi publik,

laporan EITI menunjukkan detail kontribusi dari setiap perusahaan migas. Lebih jauh lagi, laporan tersebut juga menunjukkan detail yang sama bagi setiap perusahaan pertambangan besar dan kecil, termasuk perusahaan yang memiliki ijin lokal.

Emy Perdanahari, Ketua Sekretariat Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia, mengatakan, "Sektor ekstraktif Indonesia dan jumlah pendapatan yang dihasilkan telah lama menjadi sebuah kontroversi, hanya karena informasi mendetil tidak tersedia bagi masyarakat. Dengan laporan ini, masyarakat mulai dapat mengetahui berapa pembayaran yang dilakukan oleh setiap perusahaan migas atau

pertambahan kepada setiap instansi pemerintahan yang berwenang. Hal ini adalah sebuah pencapaian yang signifikan dalam transparansi pemerintahan.”

Laporan tersebut menyajikan untuk pertama kalinya jumlah detail atas pajak penghasilan dan kontribusi royalti dari sektor pertambangan mineral dengan batubara. Sebelum implementasi EITI, angka yang tersedia hanyalah atas kontribusi total atas royalti yang dibayarkan seluruh perusahaan pertambangan. Laporan EITI Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan mineral (emas, tembaga, nikel, timah dan bauksit) memberikan kontribusi sebesar Rp12.5 triliun (US\$1.2 milyar) pajak penghasilan dan Rp12.5 triliun (US\$1.2 milyar) royalti, sementara perusahaan-perusahaan pertambangan batubara dalam laporan ini memberikan kontribusi sekitar Rp10.4 triliun (US\$1 milyar) pajak penghasilan dan Rp13.5 triliun (US\$1.3 milyar) royalti. Angka kontribusi sesungguhnya lebih besar, karena Laporan EITI ini tidak melingkupi perusahaan pertambangan kecil serta beberapa perusahaan menengah dan besar yang angka setoran pajaknya tidak dapat disampaikan oleh Ditjen Pajak terkait dengan pemenuhan ketentuan UU Perpajakan mengenai pengungkapan data wajib pajak.

Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif dari Indonesian Coal Mining Association, menyatakan, “Laporan EITI memberikan pengertian yang sejelas-jelasnya kepada publik atas kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan Negara. Di samping itu, di sektor pertambangan, kita juga harus memperhitungkan adanya multiplier effect yang akan mengangkat nilai total dari kontribusi yang tercatat.”

Laporan rekonsiliasi EITI Indonesia ini juga mencatat masih lemahnya partisipasi sektor pertambangan dalam mentransparansikan kontribusinya kepada negara. Laporan ini menyatakan bahwa Pemerintah mencatat penerimaan pajak penghasilan Rp2.93 triliun (US\$282 juta) lebih dari apa yang dilaporkan dibayar oleh perusahaan pertambangan. Penyebab perbedaan

Laporan Pertama EITI Indonesia Berikan Perspektif Industri (samb.)

ini yang terbesar adalah berasal dari dua perusahaan batubara besar di Indonesia yang merupakan anak usaha Bumi Resources, yang tidak menindaklanjuti permintaan Rekonsiliator atas rincian pembayaran pajak tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan pada tahun 2009.

Laporan EITI Indonesia juga mencatat masih lemahnya pengelolaan informasi pertambangan di instansi Ditjen Minerba. Indikasi hal ini ditunjukkan dari angka perbedaan royalti batubara antara yang dibayarkan oleh perusahaan dan yang diterima di kas Negara di mana pada awalnya tercatat sebesar US\$727 juta dan setelah Rekonsiliator memeriksa catatan fisik di Ditjen Minerba, maka angka perbedaan menjadi jauh lebih kecil yaitu sebesar US\$54 juta. Khusus untuk penerimaan bukan-pajak sektor pertambangan, terdapat 493 kali peninjauan atas catatan dokumen fisik, atau lebih dari 75 persen jumlah seluruh peninjauan dalam laporan ini.

Laporan EITI Indonesia pertama ini juga membantu masyarakat untuk mengetahui jumlah pembayaran setiap perusahaan yang menjadi hak daerah berdasarkan prinsip derivasi

dan realisasi. Informasi tersebut belum mendapatkan perhatian publik, karena informasi detail kontribusi dari setiap perusahaan ekstraktif kepada pemerintah daerah tidak berada dalam satu laporan bersamaan dengan total yang disetorkan kepada Pemerintah Pusat. Kini, informasi seperti ini telah diinisiasi dalam laporan EITI Indonesia Pertama tahun 2009, yaitu meliputi berapa kontribusi dari perusahaan ekstraktif yang dibagihasilkan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan dikeluarkannya Laporan EITI Indonesia, rakyat di daerah kaya sumber daya alam akan menerima jawaban tidak hanya tentang penerimaan Negara dari perusahaan migas dan pertambangan, tetapi juga yang lebih penting dari perspektif daerah, berapa jumlah penerimaan dari setiap perusahaan yang mengalir kepada propinsi dan kabupaten. “Ini adalah sebuah alat bagi rakyat untuk mengejar pertanggungjawaban dari pemerintahnya,” ucap Faisal Basri, Perwakilan Masyarakat Sipil dalam Tim Implementasi EITI Indonesia. (*)



Tim Sekretariat EITI Indonesia saat di Konferensi Global ke-6 EITI, Sydney. ki-ka: Ronald Tambunan, Yuliana, Fajar Reksoprodjo, Ambarsari Dwi Cahyani, Anita Pascalia, Tri Wicaksono.

Semua negara yang menerapkan EITI harus melalui suatu proses yang dikenal sebagai “validasi”. Validasi adalah suatu proses dimana “validator”, yaitu suatu institusi independen yang telah diakreditasi oleh EITI Internasional, menentukan tingkat ketaatan suatu negara dalam menerapkan 18 Peraturan EITI. Pembiayaan validator berasal dari negara pelaksana, yaitu bersumber dari anggaran negara pelaksana tersebut.

Panitia Pengadaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada akhirnya memilih Deloitte Australia sebagai validator.

Deloitte Australia bekerja sejak tanggal 25 Februari 2013 dan awalnya diharapkan dapat menyelesaikan validasi pada 18 April 2013, yaitu batas tenggat penyerahan laporan validasi Indonesia kepada Dewan EITI Internasional. Namun penyelesaian laporan tersebut dengan jadwal sebelumnya tidak dimungkinkan terkait dengan tertundanya pengesahan Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia. Waktu tambahan juga dibutuhkan agar validator dapat mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh Dewan EITI Internasional.

Untuk mengantisipasi keterlambatan yang terjadi, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan perpanjangan tenggat waktu penyerahan laporan validasi. Komite Validasi kemudian menyampaikan permintaan ini kepada Dewan EITI Internasional dan menyarankan perpanjangan tenggat waktu selama 3 bulan hingga 18 Juli 2013, yang dikabulkan oleh Dewan EITI Internasional. Namun demikian, saat ini validator diharapkan dapat menyelesaikan laporan validasi secepat mungkin.

Hingga berita ini diturunkan, validator telah bekerja selama kurang lebih empat bulan, dan tengah mempertimbangkan masukan Komite Validasi atas draft laporannya. Validator telah melakukan evaluasi terhadap dokumentasi yang memperlihatkan keberlangsungan proses EITI yang berlangsung di Indonesia, dan telah melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan selama hampir



Tim Sekretariat EITI Indonesia, Rekonsiliator KAP Gideon Ikhwan Sofwan, LSM IDEA, SKK Migas dan Dit. PNPB Kemenkeu melakukan pembahasan akhir finalisasi laporan pertama EITI Indonesia dalam Ratimlak 22 April 2013, Jakarta.

Validasi: Penentuan Status EITI Indonesia

dua minggu untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan EITI di Indonesia.

Jika sesuai dengan rencana, laporan dapat diselesaikan oleh validator di bulan awal Juli 2013, dan setelah itu Dewan EITI akan membuat keputusan apakah Indonesia dapat meningkatkan statusnya dari Kandidat menjadi Taat EITI.

Jika ternyata Indonesia dinyatakan tidak memenuhi satu atau lebih dari 18 persyaratan yang ada, maka ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi: Yang pertama, jika Indonesia dianggap telah membuat kemajuan yang berarti maka perpanjangan waktu hingga satu tahun akan diberikan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada selama ini (berdasarkan hasil validasi). Kedua, Indonesia dapat dikeluarkan dari keanggotaan EITI jika dianggap tidak ada kemajuan yang berarti. Namun skenario yang kedua ini kecil kemungkinannya akan terjadi, karena hingga saat ini hanya ada dua Negara yang pernah dikeluarkan dari keanggotaan EITI.

Sebagai catatan, terkait dengan keraguan beberapa OMS mengenai jumlah laporan yang harus dipublikasi

oleh EITI Indonesia, Sekretariat EITI Internasional telah menyatakan bahwa tidak ada persyaratan yang menyatakan jumlah tertentu laporan yang harus dipublikasi oleh Indonesia sebelum dilakukannya validasi.

Jika Indonesia dinyatakan sebagai negara taat EITI, banyak pihak akan ikut menikmati manfaatnya. Bagi negara, hal ini akan meningkatkan iklim investasi dengan memberikan sinyal positif kepada penanam modal dan institusi keuangan internasional terhadap komitmen Indonesia atas transparansi selain mendukung stabilitas ekonomi dan politik serta pencegahan konflik atas sumber daya alam minyak dan gas bumi dan pertambangan.

Untuk perusahaan dan penanam modal, status “Taat” dapat membantu menekan resiko politik dan reputasi dalam menjalankan usaha di Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat sipil, status “Taat” dapat menjadi indikator bahwa telah, dan akan terwujud, peningkatan arus informasi kepada publik terkait penerimaan yang diperoleh pemerintah dari industri ekstraktif. (*)

Edukasi Pemahaman EITI oleh Organisasi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil telah memainkan peranan penting dalam kemunculan EITI di Indonesia; Multi Donor Trust Fund EITI dengan Program Dukungan Langsung kepada OMS, mendanai kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia yang secara efektif berkontribusi terhadap implementasi EITI. Kegiatan itu merupakan sebuah proyek peningkatan kapasitas yang memungkinkan OMS untuk melakukan penelitian, penilaian data sub-nasional yang terdapat dalam laporan EITI serta kegiatan komunikasi untuk penyebarluasan temuan-temuan kepada masyarakat di lingkungan mereka.

Organisasi Masyarakat Sipil Article 33, salah satu anggota koalisi Publish What You Pay Indonesia, saat ini menjadi koordinator kegiatan penelitian dan komunikasi dari organisasi-organisasi di lima kepulauan besar Indonesia, dengan topik meliputi:

1. Identifikasi izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan Kabupaten, dan penilaian atas pendapatan sub-nasional di Provinsi Riau, Pulau Sumatera (pendapatan atas minyak, gas dan pertambangan);
2. Penelitian Spasial/ruang di provinsi yang memproduksi bauksit terbesar di Indonesia (Kalimantan Barat), untuk menyertakan hamparan peta pertambangan dan konsesi sumber daya lainnya yang terdapat di kabupaten dan peta basis provinsi untuk menunjukkan daerah-daerah konflik pertanahan, dan operasi yang berpotensi ilegal;
3. Penilaian terhadap kontribusi pendapatan Industri Ekstraktif (EI) yang dikumpulkan secara lokal, dan juga yang di pusat dan kemudian didistribusikan kembali secara lokal untuk anggaran provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Penilaian pendapatan sub-nasional di provinsi Sulawesi Tenggara melalui pengumpulan informasi (kepemilikan, nilai uang, jumlah produksi, dan pendapatan yang dihasilkan) atas izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang diterbitkan di tiga kabupaten;
5. Penyebarluasan data EITI di Papua oleh sebuah asosiasi wartawan melalui acara talk show di TV, talk show di Radio, konferensi pers, dan media baru untuk menjelaskan temuan-temuan dari laporan pertama EITI Indonesia.

Temuan-temuan dari kegiatan penelitian akan disajikan di daerah-daerah tempat kegiatan itu dilakukan, dan tersedia untuk diketahui bagi masyarakat luas. Kegiatan penelitian dan komunikasi diharapkan sebagian besar selesai pada tahun kalender 2013. (*)

Catatan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia Tahap II, 2010-2011

Saat ini Indonesia sedang menyiapkan Laporan EITI tahap kedua. Peraturan EITI mensyaratkan bahwa perbedaan waktu antara publikasi laporan dengan tahun laporan tak lebih dari dua tahun. Dalam rangka memenuhi persyaratan itu, maka catatan ruang lingkup untuk laporan kedua ini mencakup laporan dua tahun yaitu 2010 dan 2011.

Keputusan tentang "ruang lingkup" adalah bagian yang penting dalam proses EITI. Catatan ruang lingkup adalah referensi untuk laporan EITI. Catatan ini sudah dibahas dan diputuskan dalam rapat-rapat Tim Pelaksana Transparansi bulan Juli 2012 dan Januari serta Maret 2013.

Pendapatan dari sumber daya alam (SDA) dari sektor migas dan pertambangan dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu pajak dan bukan-pajak. Kontribusi pajak dan bukan-pajak di tahun 2010 dan 2011 ditunjukkan pada Tabel 1, di mana secara rata-rata menyumbang 25 persen dari total penerimaan negara.

Dalam catatan ruang lingkup tahap kedua ini dijelaskan lima hal sebagaimana dirangkum dalam paparan di bawah ini.

1. Tipe dari penerimaan yang akan dimuat dalam laporan EITI Indonesia kedua sebagaimana juga dilaporkan untuk

tahun 2009, dari sektor migas, operator migas (dan, diantaranya, mitra) akan melaporkan aliran penerimaan kepada pemerintah sebagai berikut:

- minyak (termasuk kondensat) dan gas ekuitas bagian pemerintah yang diserahkan kepada Pemerintah dalam bentuk natura;
- over/under-lifting dalam bentuk nilai uang;
- Domestic Market Obligation (DMO) dalam bentuk natura;
- pajak migas yang meliputi pajak corporate dan dividend serta branch profit tax;
- signature bonus;
- production bonus.

Di pelaporan kedua ini operator juga akan melaporkan item nilai DMO fee yang diterima dari Pemerintah, serta dilaporkan pula gas ekuitas Pemerintah dalam satuan MMBTU.

Untuk sektor pertambangan, perusahaan mineral dan batubara akan melaporkan pajak penghasilan badan, PBB Pertambangan, iuran produksi (royalti), iuran tetap (landrent/deadrent); serta dividen yang dibayar oleh BUMN dan perusahaan swasta yang sebagian sahamnya dimiliki

Tabel 1
Pendapatan dari SDA migas dan pertambangan (dalam triliun Rupiah)

Uraian	2010	2011
Pajak		
PPh Badan Migas	58,87	76,43
PBB Migas	19,33	20,48
PBB Pertambangan	0,50	0,40
Bukan Pajak		
Penerimaan dari minyak bumi	111,82	141,30
Penerimaan dari gas	40,92	52,19
Penerimaan dari pertambangan umum	12,65	16,37
Total	244,09	307,17
Total Penerimaan Negara	992,25	1.205,35

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2011 hal. 182-184
Catatan: US\$1 lebih kurang berada pada kisaran rata-rata Rp10.000,-

oleh Pemerintah. Item-item tersebut adalah yang akan direkonsiliasi dengan laporan dari instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah yang akan melapor juga masih sama, yaitu sebagai berikut:

- Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas; dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Dari Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran; Direktorat Jenderal Pajak; dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) yang sebelumnya adalah BPMIGAS.

2. Dasar materialitas dan perusahaan/unit produksi yang akan melapor:

Materialitas adalah dasar untuk menentukan apakah sebuah unit produksi dapat dikategorikan sebagai entitas pelapor atau tidak. Materialitas untuk laporan EITI menggunakan batas nilai tertentu atas basis suatu tipe penerimaan yang dianggap cukup mewakili kontribusi kepada negara. Materialitas yang diajukan untuk pelaporan EITI tahap kedua ini masih sama dengan pelaporan tahap pertama. Untuk migas, batas nilai materialitas adalah jika kontraktor dan mitranya menyetorkan bagian migas pemerintah di atas nol, dimana artinya bahwa seratus persen dari kontraktor dan mitra yang berkontribusi kepada penerimaan negara atas migas akan menyerahkan laporan.

Sementara untuk mineral dan batubara, materialitasnya didasarkan pada setiap unit produksi pertambangan yang menyetorkan royalti kepada negara selama tahun berjalan lebih besar dari USD 500.000 sepanjang 2010 dan/atau 2011. Dengan materialitas ini, entitas pertambangan yang tercakup dalam laporan EITI meliputi 97,5 persen dari seluruh perusahaan penyeter royalti di tahun 2011.

Atas dasar materialitas di atas, diperoleh daftar unit produksi yang akan menjadi entitas pelapor. Secara ringkas, jumlah entitas pelapor unit produksi berdasarkan jenis komoditas

Catatan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia Tahap II, 2010-2011 (samb.)

Tabel 2

Jumlah Unit Produksi yang melapor untuk Laporan EITI kedua

Komoditas	Jumlah Unit Produksi	
Minyak dan gas	60 KKKs*	
Pertambangan		
Tembaga/emas	5 KK	2 IUP
Timah	1 KK	19 IUP
Bauksit	-	7 IUP
Nikel	1KK	15 IUP
Bijih Besi	-	3 IUP
Batubara	35 PKP2B	106 IUP
Total	261 unit produksi	

*Terdapat sejumlah mitra yang akan melapor sesuai Kontrak Kerja Sama

Catatan: KKKs = Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KK = Kontrak Karya

PKP2B = Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

IUP = Izin Usaha Pertambangan.

dapat dilihat pada Tabel 2.

EITI Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam penyusunan laporan 2010 dan 2011 berkaitan dengan pengumpulan informasi dari para pemegang IUP provinsi dan kabupaten. Sebagian besar pemegang IUP tersebut tidak merasa memiliki pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, dikarenakan ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Dengan upaya keras, EITI Indonesia telah berhasil mengumpulkan formulir pelaporan dari 22 pemegang IUP lokal untuk laporan tahun 2009. Namun begitu, setidaknya hampir 7 kali lipat dari jumlah tersebut harus didapatkan informasinya untuk laporan tahun 2010 dan 2011.

3. Metode rekonsiliasi dan batas bawah yang akan ditelusuri atas perbedaan rekonsiliasi:

Rekonsiliator akan memperbandingkan laporan dari kedua pihak. Jika ditemukan perbedaan, maka akan dilakukan pencarian bukti-bukti hingga penyebab perbedaan dapat diketahui. Jika perbedaan masih ada tetapi penyebab perbedaan tidak ditemukan, maka dapat dilakukan audit

terbatas, atau proses selesai sampai pada angka perbedaan tersebut. Namun demikian, audit terbatas akan diupayakan seminimal mungkin.

Batas bawah yang perlu ditelusuri harus ditetapkan oleh Tim Pelaksana Transparansi. Batas bawah ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah angka yang berbeda, tingkat kerumitan dokumen, dan waktu rekonsiliasi.

4. Daerah yang akan melapor dan tipe penerimaannya:

Surat Dirjen Perimbangan Keuangan merekomendasikan 6 daerah yang akan melapor, yaitu Provinsi Kalimantan Timur; Kab. Bengkalis, Riau; Kab. Muara Enim, Sumsel; Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim; Kab. Banjar, Kalsel; Kab. Tabalong, Kalsel.

Dengan pertimbangan tingkat besaran dan kompleksitas laporan Kedua, rapat Tim Pelaksana 14 Maret 2013 memutuskan dari 6 daerah yang diajukan, hanya dua daerah yang akan melapor, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. (*)

Transparansi Sektor Minerba

Erry Riyana Hardjapamekas – satu dari Dua Perwakilan Pelaksana periode 2011 – 2013 untuk Asia dalam Dewan Internasional EITI, Oslo, Norwegia

(diterbitkan sebelumnya di Harian Kompas, Opini, 24 Mei 2013)

Kelompok kerja yang terdiri dari unsur pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir telah bekerja sama dalam menerapkan asas transparansi terkait penerimaan negara dari industri migas, mineral, dan batubara.

Hasil kerja sama dalam bentuk laporan tersebut merupakan hak atas informasi yang dimiliki rakyat Indonesia. Laporan tersebut juga dipergunakan sebagai alat akuntabilitas pemerintahan.

Tahun 2010 menjadi tonggak penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 yang menjadi landasan bagi Indonesia untuk menerapkan Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative/EITI*). Sebuah standar global yang diterapkan di 37 negara.

EITI mendorong pelaporan oleh para produsen migas, mineral, dan batubara atas apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Sebaliknya, pemerintah melaporkan penerimaan negara dari perusahaan-perusahaan tersebut. Laporan yang diterima dari para pelaku usaha dan pemerintah kemudian ditelaah oleh "rekonsiliator" independen dan dibentuk menjadi sebuah laporan EITI nasional.

Keseluruhan proses diawasi oleh sebuah kelompok kerja multi-stakeholder yang meliputi instansi pemerintahan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Di Indonesia, kelompok kerja ini terdiri dari 13 direktur jenderal dari lima kementerian, pejabat tinggi dari tiga provinsi yang kaya sumber daya alam, tiga perwakilan dari asosiasi-asosiasi industri ekstraktif, serta tiga perwakilan masyarakat sipil yang dipilih.

Laporan EITI Indonesia pertama ini adalah sebuah upaya dan kerja keras yang menyajikan hasil rekons-

siliasi antara aliran dana dari 50 perusahaan Kontrak Kerja Sama (KKS) migas, 16 perusahaan pertambangan mineral, dan 53 perusahaan pertambangan batubara yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia, dengan jumlah yang diterima oleh Badan Pengelola Kegiatan Hulu Migas (kini SKK Migas), Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Laporan pertama ini dibuat khusus untuk tahun kalender 2009.

Perbedaan angka

Beberapa perbedaan antara jumlah pembayaran yang diserahkan oleh pelaku usaha kepada pemerintah dan jumlah penerimaan yang dilaporkan oleh pemerintah telah ditemukan. Namun, umumnya hal-hal tersebut berkenaan dengan laporan pemerintah yang memuat jumlah penerimaan yang lebih dari apa yang telah dilaporkan dibayarkan oleh pelaku usaha. Suatu hal yang bertentangan dengan perkiraan banyak kalangan.

Dalam hal pembayaran over- dan under-lifting migas, pemerintah melaporkan penerimaan sebesar 29 juta dollar AS lebih besar dari yang telah dilaporkan para pelaku usaha. Hal ini karena pemerintah juga memasukkan angka jumlah piutang yang hingga kini masih dalam penyelesaian.

Untuk pajak penghasilan migas, pemerintah melaporkan penerimaan 96 juta dollar AS lebih besar dari yang dilaporkan para pelaku usaha. Hal ini sebagian besar dikarenakan EITI Indonesia tidak mengirimkan formulir pelaporan kepada 76 mitra kerja dari 50 Kontraktor KKS. Alhasil, beberapa dari mitra kerja tersebut tidak menyerahkan laporannya.

Pemerintah melaporkan peneri-

maan pajak penghasilan dari perusahaan pertambangan batubara sebesar 273 juta lebih besar dari yang dilaporkan para pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh setidaknya dua badan usaha besar yang tidak melaporkan kepada EITI Indonesia pajak 2007 yang dibayarkan ke negara pada 2009.

Untuk royalti batubara, pemerintah melaporkan penerimaan 54 juta dollar AS lebih besar dari yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Awalnya, perbedaan tersebut mencapai lebih dari 750 juta dollar AS, tetapi angkanya mengecil setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik yang dikelola Ditjen Mineral dan Batubara.

Hal yang menggembirakan adalah bahwa perbedaan-perbedaan yang bisa ataupun tidak bisa direkonsiliasi tersebut tidak mengindikasikan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan. Perbedaan lebih disebabkan adanya perselisihan usaha, kesalahan input, dan sistem pengelolaan informasi penerimaan negara yang belum optimal.

Perizinan daerah

Ditjen Mineral dan Batubara menduga ada 10.250 izin pertambangan daerah yang telah dikeluarkan. Meski tak ada angka yang pasti, perkiraan ini cukup mengkhawatirkan mengingat perusahaan-perusahaan berizin daerah bertanggung jawab hanya kepada kepala daerah yang mengeluarkan izin.

Selama masyarakat tidak mengetahui dengan jelas apa dan siapa perusahaan berizin daerah tersebut – nama, pemiliknya, hasil tambangnya, dan berapa besar mereka membayar (atau tidak membayar) royalti dan pajak ke kas negara – kita tidak dapat menghitung kontribusinya pada pembangunan Indonesia, khususnya ketika ada kritik mengenai dampak lingkungan dari beberapa tambang.

Laporan pertama EITI Indonesia menyajikan rincian atas 22 perusahaan tambang berizin daerah terbe-

Transparansi Sektor Minerba (samb.)

sar (dalam konteks kontribusi penerimaan). Sementara laporan kedua, yang menurut rencana akan diterbitkan pada akhir tahun ini, akan memberikan sajian laporan dari 149 perusahaan tambang terbesar, yang terdiri dari 2 tambang emas, 18 timah, 14 nikel, 3 bijih besi, 7 bauksit dan 105 batubara.

Alat pengawasan akuntabilitas pemerintah daerah bagi rakyat

Hingga saat ini, sebagian besar rakyat Indonesia masih tidak menyadari jumlah penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang mengalir ke pemerintah daerah. Lebih dari itu, data tentang berapa besar penerimaan tahunan atas bagi hasil pemerintah daerah dari satu perusahaan tertentu belum pernah dilaporkan secara publik. Hasilnya, masyarakat yang tinggal di sekitar area operasi produksi migas, mineral, dan batubara berada dalam posisi yang lemah untuk menuntut pelayanan publik dari pemerintah daerah.

EITI Indonesia telah mengubah situasi ini. Kini, masyarakat yang tinggal di daerah kaya SDA dapat mengetahui besaran aliran penerimaan dari satu perusahaan tertentu kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.

Sebagai contoh, EITI Indonesia

mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten di Riau telah menerima hampir dua pertiga dari satu juta miliar dollar AS penerimaan negara yang dibayarkan oleh KKS penghasil minyak terbesar di Indonesia (Blok Rokan Chevron).

Kalimantan Timur menikmati lebih dari seperempat miliar dollar AS penerimaan negara dari KKS penghasil gas bumi terbesar di Indonesia (Blok Mahakam Total dan Inpex).

Di Papua, lebih dari 100 juta dollar AS pembayaran royalti dari perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar, Freeport Indonesia, telah diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.

Laporan EITI Indonesia menyajikan informasi yang sama atas 50 perusahaan migas dan 69 perusahaan pertambangan yang memberikan laporan.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya EITI Indonesia, informasi atas penerimaan dari SDA kini tersedia. Sebelumnya kita hanya memiliki hak mengetahui, kini hak itu kita wujudkan dengan menerima informasi secara transparan. (*)

OMS Indonesia bantu Filipina dalam Implementasi EITI

OMS Indonesia telah memberikan bantuan kepada rekan-rekan dari Filipina dalam mempromosikan transparansi penerimaan Negara, dan mengimplementasikan EITI, dibawah naungan Proyek IKAT-US, yang dikelola oleh The Revenue Watch Institute (RWI). RWI adalah sebuah LSM global yang telah bekerja di kawasan Asia Pasifik sejak tahun 2008, dan proyek IKAT-US yang dikelolanya merupakan sebuah kemitraan dengan tiga LSM Indonesia lainnya – Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Article 33 (previously Pattiro Institute) – dan rekan-rekan masyarakat sipil dari Asia Tenggara, Bantay Kita di Filipina, Luta Hamutuk di Timor Leste, Cambodians for Resource Revenue Transparency (CRRT), Pan Nature dan CODE di Vietnam serta Research For Social Advancement (REFSA) di Malaysia. EITI adalah sebuah prioritas utama dalam kemitraan ini dan seluruh partisipan telah bekerjasama untuk mempromosikan transparansi dan pertanggungjawaban yang efektif dalam industry minyak dan gas bumi serta pertambangan pada tingkatan regional, nasional dan sub-nasional.

Baru-baru ini, Proyek IKAT telah mencapai langkah signifikan dalam mempromosikan EITI di Filipina: Mitra dari Timor Leste dan Indonesia telah berbagi pengalaman tentang proses EITI dengan rekan-rekannya di Filipina, dan RWI memberikan dukungan kepada Bantay Kita untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas EITI, dan untuk menggerakkan keterlibatan masyarakat sipil pada tingkatan local maupun nasional dalam proses EITI. Kegiatan tersebut mencapai puncaknya pada Januari 2013 ketika anggota Bantay Kita secara resmi melakukan pemilihan perwakilan untuk duduk dalam Kelompok Multi-Pemangku Kepentingan (MSG) di Filipina. MSG tersebut merupakan satu pengejawantahan atas Perintah Eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Filipina atas pelaksanaan EITI di Negara tersebut.

Kerjasama antara mitra OMS dari Indonesia dan Filipina juga telah membuahkan hasil yang positif pada tingkatan sub-nasional. Revenue Watch dan Article 33 telah membangun kerjasama erat dengan Bantay Kita dan Paglilingkod Batas Pangkapatiran Foundation/PBPF (Service in Law for Solidarity) untuk membangun mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban sub-nasional di Compostella Valley, salah satu titik penambangan emas ilegal di Filipina, dan juga untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengawasi sektor pertambangan di area tersebut. Di tahun sebelumnya, mengambil buah pengalaman Indonesia atas transparansi di Bloro dan Bojonegoro, para Mitra tersebut bekerjasama untuk mempercepat pengesahan Perintah Eksekutif untuk membentuk sebuah Dewan Multi-Pemangku Kepentingan di Compostella Valley, yang mewakili pemerintah local, pelaku usaha dan masyarakat sipil. Upacara pengambilan sumpah anggota dewan tersebut dilaksanakan pada 19 November 2012, dan diharapkan bahwa proyek tersebut akan dapat menyokong proses EITI nasional dan memfasilitasi pelaporan EITI sub-nasional di Filipina.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan RWI IKAT, kunjungi <http://www.revenuewatch.org/ikat-us>. (*)



Rehat santap malam bersama Bpk. Erry Riyana Hardjapamekas disela-sela kegiatan Konferensi Global ke-6 EITI.

Kalender Pencapaian EITI Indonesia: Semester Pertama 2013

17 Desember 2012 – 22 Februari: Pengadaan Validator dengan Metode Lelang Internasional.

21 Desember 2012: Penandatanganan kontrak kerja dengan KAP Gideon Ikhwan Sofwan untuk melakukan rekonsiliasi data industri dan pemerintah yang telah dilaporkan untuk tahun kalender 2009, serta penyusunan hasil rekonsiliasi tersebut kedalam Laporan EITI Indonesia yang pertama.

28 Januari - 2 Februari: Kepala Unit Kerja Bank Dunia untuk EITI Indonesia (Frederic Cegarra Escolano) telah berhasil menyelesaikan tugas pengawasan atas EITI Indonesia di Jakarta.

30 Januari: Rekonsiliator Laurence Carey melakukan pertemuan dengan Direktur Pengembangan Program Minyak dan Gas Bumi (Heri Poernomo) dan Kepala Divisi Penerimaan Pemerintah (Agus Adi Cahyono) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan penjelasan atas perlunya kesediaan data aktual untuk volume gas bagian pemerintah dari produsen, yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan yang sangat besar dalam laporan EITI karena perbedaan satuan.

31 Januari: Tim Pelaksana EITI Indonesia melakukan pertemuan dan melakukan dengar pendapat atas:

- hasil pertemuan 4 Desember 2012 Tim Pengarah Tingkat Menteri, yang menghasilkan proposal amandemen atas Peraturan Presiden tentang EITI Indonesia untuk memasukkan persyaratan bahwa Indonesia menjalani validasi sebagai bagian dari proses tersebut, dan menyertakan perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kehutanan dalam Tim Implementasi
- bahwa beberapa data yang dibutuhkan untuk laporan 2009 belum diserahkan oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM, dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan
- jadwal penyusunan laporan pertama EITI Indonesia untuk tahun 2009, dan memberikan persetujuan atas ambang batas pertanyaan tentang perbedaan (\$5.000 dalam hal perbedaan pembayaran pertambangan tunggal, \$500.000 dalam hal pembayaran hasil minyak dan gas dan 5.000 barel dalam hal penyerahan hasil minyak bagian pemerintah)
- jadwal penyelesaian validasi EITI Indonesia

25 Februari: Rekonsiliator terpilih, yaitu KAP

Gideon Ikhwan Sofwan menyerahkan draft pertama laporan rekonsiliasi kepada Ketua Tim Pelaksana EITI Indonesia. Draft laporan rekonsiliasi ini berisi tentang perbandingan angka yang dilaporkan oleh pemerintah dan industri, serta perbedaan yang ditemukan.

26 Februari: Validator terpilih, yaitu Deloitte Australia menandatangani kontrak untuk pelaksanaan proses validasi (evaluasi independen eksternal) atas penerapan EITI di Indonesia.

26 – 28 Februari: Pertemuan Dewan EITI di Oslo, Norwegia dihadiri oleh Perwakilan Terpilih Pemerintah Republik Indonesia untuk Dewan EITI (Erry Riyana Hardjapamekas), Kepala Sekretariat EITI Indonesia dan Asisten Deputy untuk Energi dan Ketenagalistrikan Kemenko Perekonomian (Emy Perdanahari), dan pelaksana harian Sekretariat EITI Indonesia (Ambarsari Dwi Cahyani).

8 Maret: Rekonsiliator KAP Gideon Ikhwan Sofwan menyerahkan draft laporan EITI Indonesia kepada Tim Pelaksana EITI Indonesia.

12 Maret: Validator tiba di Indonesia.

14 Maret: Tim Pelaksana EITI Indonesia melakukan pertemuan untuk mendiskusikan dan memberikan rekomendasi perubahan atas draft kedua laporan final EITI Indonesia, dan untuk pertama kalinya bertemu dengan validator.

15 – 21 Maret: Validator melakukan kunjungan dan wawancara dengan pemangku kepentingan EITI Indonesia, khususnya anggota Tim Pelaksana EITI Indonesia.

28 Maret: Tim Pelaksana EITI Indonesia melakukan pertemuan untuk membahas draft ketiga Laporan EITI Indonesia untuk tahun 2009 dan persiapan penerbitannya, serta untuk menyetujui cakupan pelaporan untuk laporan EITI Indonesia berikutnya untuk Tahun 2010 dan 2011.

17 - 18 April: Pertemuan antara perwakilan dari SKK Migas, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dengan Rekonsiliator KAP Gideon Ikhwan Sofwan, dan Sekretariat EITI Indonesia untuk membahas draft laporan final khususnya bagian minyak dan gas bumi.

22 April: KAP Gideon Ikhwan Sofwan menyampaikan Laporan Final EITI Indonesia dan Tim Pelaksana EITI Indonesia menerima dan menyetujui laporan tersebut.

22 April: Sekretariat EITI Indonesia

mempublikasikan Laporan Pertama EITI Indonesia untuk Tahun 2009 melalui situs resmi dan penyebarluasan pengumuman melalui media massa.

24 April: Draft laporan validasi diserahkan oleh Validator kepada Tim Pelaksana EITI dan Komite Validasi Dewan EITI.

7 Mei: Diskusi kuartalan (Quarterly Roundtable Discussion) tentang Tata-Kelola Industri Ekstraktif yang menyertakan perwakilan Negara-negara donor multilateral dan bilateral yang menyokong EITI Multi- Donor Trust Fund (MDTF). Perkembangan pelaksanaan EITI dan peluncuran Laporan Pertama EITI Indonesia dilaporkan oleh Ketua Sekretariat, Dr. Emy Perdanahari.

14 Mei: Pertemuan nasional pertama untuk mengkomunikasikan Laporan Pertama EITI Indonesia serta sosialisasi persiapan pelaporan kedua. Pertemuan ini diselenggarakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

20 - 22 Mei: Lokakarya komunikasi EITI Internasional untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas komunikasi massa di Sydney, Australia, dihadiri oleh Anita Pascalia (Revenue Specialist) dan Tri Wicaksono (IT Specialist).

20 - 21 Mei: Konferensi Pertambangan untuk Pembangunan (Mining for Development) yang diorganisir oleh pemerintah Australia melalui AusAID di Sydney, Australia, dihadiri oleh Ambarsari Dwi Cahyani (Revenue Specialist) dan Ronald Tambunan (Regulatory Specialist).

22 - 24 Mei: Konferensi Global ke-6 EITI Internasional di Sydney, Australia. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian (ketua delegasi Indonesia: Plt. Deputi III, Bambang Adi Winarso), SKK Migas, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, perwakilan Industri, perwakilan pemerintah daerah, serta tim Sekretariat EITI Indonesia. Perwakilan Indonesia di Dewan Internasional EITI, Erry Riyana Hardjapamekas, memberikan sambutan khusus dalam Forum Pemangku Kepentingan EITI. Ketua Sekretariat, Emy Perdanahari, berpartisipasi dalam diskusi parallel khusus mengenai dampak pelaporan EITI.

18 Juni: Pertemuan nasional kedua untuk mengkomunikasikan temuan Laporan Pertama EITI Indonesia serta sosialisasi persiapan pelaporan kedua. Pertemuan ini diselenggarakan di Hotel Novotel, Surabaya, dan dipimpin oleh Ketua Sekretariat EITI/Asisten Deputi III Menko Perekonomian, Dr. Emy Perdanahari. (*)